

**EVALUASI PELAKSANAAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PADANG**

TESIS



ROLLY IRAWAN

1910018322009

Tesis ini Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh

Gelar Magister Teknik Pada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2023

**EVALUASI PELAKSANAAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PADANG**

TESIS



ROLLY IRAWAN

1910018322009

**PROGRAM STUDI MAGISTER ARSITEKTUR
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2023

LEMBAR PERSETUJUAN

**EVALUASI PELAKSANAAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PADANG**

Oleh :

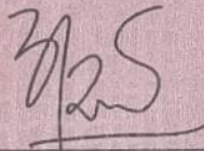
ROLLY IRAWAN

1910018322009

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 18 Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Era Triana, S.T, M.Sc


Pembimbing II



Dr. Zulherman, S.T, M.Sc

Ketua

Program Studi Magister Arsitektur



Dr. Jonny Wongso, S.T, MT

LEMBAR PENGESAHAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERBAIKAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PADANG

Oleh :

ROLLY IRAWAN

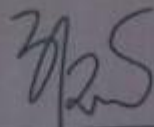
1910018322009

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji

Pada Tanggal 18 Agustus 2021

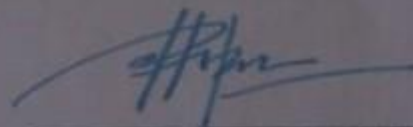
Menyetujui

Ketua,



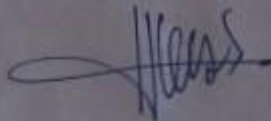
Dr. Era Triana, S.T, M.Sc

Sekretaris,



Dr. Zulherman, S.T, M.Sc

Anggota,



Dr. Jonny Wongso, S.T, MT

Anggota,



Dr. I Nengah Tela, S.T, M.Sc

Tesis Ini Telah Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Magister Arsitektur

Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan – Universitas Bung Hatta

Dekan,



Prof. Dr. Ir. Nasfryzal Carlo, M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rolly Irawan
NPM : 1910018322009
Program Studi : Magister Arsitektur

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini dengan judul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
DI KOTA PADANG**

Yang dibuat untuk melengkapi persyaratan dalam penyusunan Tesis pada Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Bung Hatta, sejauh yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari Tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan Gelar Magister Teknik dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari ternyata tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, 24 Agustus 2023
Penulis

Rolly Irawan
1910018322009

ABSTRAK

Di Kota Padang, permasalahan perumahan merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kota Padang setiap tahunnya, dikarenakan merupakan permasalahan yang terus berlanjut bahkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, salah satu program unggulan Kota Padang terkait dengan perumahan dan permukiman adalah menargetkan pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang sebagai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi permasalahan perumahan, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai tujuan dari program tersebut, yang *outcome*-nya dapat menjawab permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Padang. Namun sampai saat ini Pemerintah Kota Padang belum pernah melakukan evaluasi atau kajian terhadap implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang sudah berjalan. Berdasarkan hal tersebut, maka itu dalam penelitian ini akan mengkaji terkait implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang dengan mengambil sampel penelitian di Kecamatan Koto Tangah.

Dari hasil analisis evaluasi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwasanya program bantuan tersebut hanya berfokus kepada perbaikan dari fisik bangunan saja, sehingga belum dapat mencapai atau memenuhi kriteria rumah layak huni. Untuk arahan pengembangan atau perbaikan kedepannya direkomendasikan turut mengembangkan beberapa kriteria pendukung rumah layak huni yaitu seperti penyesuaian luas lantai sesuai dengan perhitungan jumlah penghuni di rumah tersebut, penyediaan akses terhadap air minum serta sanitasi yang layak, sehingga rumah yang tadinya termasuk kedalam kategori tidak layak huni dapat memenuhi kriteria rumah layak Huni.

Kata Kunci : Evaluasi, Rumah Tidak Layak Huni, Kota Padang,

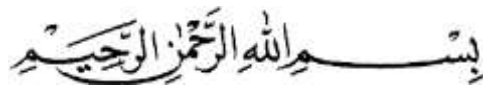
ABSTRACT

In the city of Padang, the housing problem is a major issue that always gets more attention from the Padang City Government every year, because it is a problem that continues and even continues to increase along with population growth, population dynamics and growing socio-economic demands. Based on the Regional Mid-Term Development Plan (RPJMD for Padang City for 2014-2019), one of the flagship programs for the City of Padang related to housing and settlements is targeting the implementation of repairs to Uninhabitable Houses (RTLH). The implementation of the uninhabitable house repair program in Padang City as an implementation of the Padang City Government policy in overcoming housing problems, must be in accordance with the provisions that have been set and be able to achieve the objectives of the program, whose outcomes can answer housing and organizational problems in the City of Padang. However, until now the Municipal Government of Padang has never conducted an evaluation or study of the implementation of assistance to repair uninhabitable houses that are already underway. Based on this, this research will examine the implementation of the uninhabitable housing improvement program in Padang City by taking research samples in Koto Tengah District.

From the results of the evaluation analysis that has been carried out, it can be seen that the assistance program only focuses on repairing the physical building, so that it has not been able to achieve or meet the criteria for livable housing. For future development or improvement directions, it is recommended to develop several supporting criteria for livable houses, such as adjusting the floor area according to the calculation of the number of occupants in the house, providing access to drinking water and proper sanitation, so that houses that were previously included in the uninhabitable category can be meet the criteria for livable housing.

Keywords : Evaluation, Uninhabitable Houses, Padang City

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kota Padang”**.

Penulis berharap melalui tesis ini dapat memberikan masukan konsep atau model mengenai pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni yang efektif dan efisien, sehingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni termanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penyusunan tesis ini tidak lepas dari dukungan, bimbingan serta sumbangan pikiran berbagai pihak yang selalu memberikan motivasi, saran dan pendapat. Pada kesempatan ini, setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua, istri serta keluarga besar penulis yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa dan moral sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan lancar.
2. Ibu Dr. Era Triana, S.T, M.Sc dan Bapak Dr. Zulherman, S.T, M.Sc selaku pembimbing, yang telah meluangkan waktu dan memberikan arahan serta masukan selama proses penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Jonny Wongso, S.T, M.T dan Bapak Dr. I Nengah Tela, S.T, M.Sc selaku penguji, yang memberikan masukan dan koreksinya sehingga tesis ini

menjadi lebih baik.

4. Ketua Program Studi Magister Arsitektur dan seluruh dosen pada Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Bung Hatta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama mengikuti program ini.
5. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dan memberikan dukungan data dan informasi serta arahan dan masukan selama proses penulisan tesis ini.
6. Kepada segenap rekan-rekan Bidang Cipta Karya DPUPR Kabupaten Solok yang telah memberikan sumbangan moril kepada penulis selama menempuh studi ini serta semua pihak yang memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari betul masih ada kekurangsempurnaan dalam penyulisan tesis ini, karena keterbatasan waktu, tenaga dan pengetahuan, untuk itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang membangun demi kesempurnaan hasil penelitian ini. Akhirnya, penulis mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan kepada semua pihak selama masa penulisan tesis ini.

Padang, .. Agustus 2023

Penulis

(Rolly Irawan)

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan Penelitian	6
1.3 Keaslian Penelitian.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Mafaat Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Evaluasi Program	14
2.1.1 Pengertian Evaluasi	14
2.1.2 Hakekat Evaluasi Progam	15
2.1.3 Fungsi dan Tujuan Evaluasi Program	17
2.2 Pengertian dan Fungsi Rumah	18
2.3 Rumah Tidak Layak Huni.....	21
2.3.1 Pengertian dan Kriteria Rumah Tidak Laya Huni.....	21
2.3.2 Indikator Rumah Tidak Layak Huni	24
2.3.3 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	22
2.4 Rumah Layak Huni	25

2.4.1 Pengertian dan Kriteria Rumah Layak Huni	25
2.4.2 Indikator Rumah Layak Huni	31
2.4.3 Prinsip Indikator Rumah Layak Huni	34
2.5 Kesimpulan Tinjauan Pustaka.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian / Metode Pendekatan Penelitian	37
3.2 Metode Penentuan Objek Penelitian / Sampel Penelitian.....	38
3.3 Metode Penentuan Variabel Penelitian	39
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.4.1 Pengumpulan Data Primer.....	40
3.4.2 Pengumpulan Data Sekunder	41
3.5 Metode Analiss	42
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN PELAKSANAAN PROGRAM PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KOTA PADANG, STUDI KASUS KECAMATAN KOTO TANGAH.....	45
4.1 Gambaran Umum Progra Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Padang.....	45
4.1.1 Sebaran Rumh Tidak Layak Huni Di Kota Padang	45
4.1.2 Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Padang	46
4.1.3 Bentuk Penanganan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Padang.....	47
4.1.4 Sebaran Hasil Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Padang.....	49

4.2 Pelaksanaan Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Koto Tangah.....	52
4.2.1 Gambaran Umum Pelaksanaan Progra Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Koto Tangah.....	52
4.2.2 Gambaran Umum Penerima Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni Yang Menjadi Kajian	52
4.2.3 Gambaran Umum Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Sebelum Mendapat Bantuan Program Perbaikan	54
4.2.3.1 Keselamatan Bangunan	54
4.2.3.2 Kecukupan Luas Minimum Bangunan	56
4.2.3.3 Kesehatan Penghuni	56
4.2.4 Gambaran Umum Kondisi Rumah Tidak Layak Huni Setelah Mendapat Bantuan Program Perbaikan	60
4.2.4.1 Keselamatan Bangunan	60
4.2.4.2 Kecukupan Luas Minimum Bangunan	61
4.2.4.3 Kesehatan Penghuni	62
4.3 Evaluasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Koto Tangah.....	65
4.3.1 Keselamatan Bangunan	65
4.3.2 Kecukupan Luas Minimum Bangunan.....	69
4.3.3 Kesehatan Penghuni	70
BAB V PENUTUP	82
5.1 Kesimpulan	82
5.2 Rekomendasi	83

DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Keasalian Penelitian	7
Tabel 2.1	Komponen Dan Indikator Rumah Layak Huni	32
Tabel 3.1	Variabel Penelitian	39
Tabel 4.1	Sebaran Rumah Tidak Layak Huni Kota Padang	46
Tabel 4.2	Sebaran Bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni Per Kecamatan Di Kota Padang	51
Tabel 4.3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Yang Sudah Mendapat Bantuan Perbaikan Rumah Di Kecamatan Koto Tangah	52
Tabel 4.4	Data Penerima Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Apbd Kota Padang 2022.....	53
Tabel 4.5	Kondisi Fisik Rumah Rumah Tidak Layak Huni Sebelum Mendapat Program Perbaikan	55
Tabel 4.6	Luas Lantai Rumah Tidak Layak Huni Sebelum Mendapat Program Perbaikan.....	56
Tabel 4.7	Sumber Air Bersih Rumah Tidak Layak Huni Sebelum Mendapat Program Perbaikan	57
Tabel 4.8	Sanitasi Rumah Tidak Layak Huni Sebelum Mendapat Program Perbaikan.....	57
Tabel 4.9	Kondisi Pencahayaan RTLH Sebelum Mendapat Program Perbaikan.....	58
Tabel 4.10	Kondisi Sirkulasi Udara RTLH Sebelum Mendapat Program Perbaikan.....	59
Tabel 4.11	Kondisi Fisik Rumah RTLH Pasca Mendapat Program Perbaikan ...	60

Tabel 4.12 Luas Lantai RTLH Pasca Mendapat Program Perbaikan	61
Tabel 4.13 Sumber Air Bersih RTLH Pasca Mendapat Program Perbaikan	62
Tabel 4.14 Sanitasi RTLH Pasca Mendapat Program Perbaikan	63
Tabel 4.15 Kondisi Pencahayaan RTLH Pasca Mendapat Program Perbaikan ...	64
Tabel 4.16 Kondisi Sirkulasi Udara RTLH Pasca Mendapat Program Perbaikan	64
Tabel 4.17 Perbandingan Kondisi Ketahanan Bangunan Sebelum Dan Sesudah Program Perbaikan RTLH.....	66
Tabel 4.18 Analisis Kondisi Bangunan Yang Mendapat Program Perbaikan RTLH	69
Tabel 4.19 Perbandingan Kecukupan Luas Tempat Tinggal Sebelum Dan Sesudah Program Perbaikan RTLH	70
Tabel 4.20 Analisis Kecukupan Luas Tempat Tinggal Bangunan Yang Mendapat Program Perbaikan RTLH.....	70
Tabel 4.21 Perbandingan Akses Terhadap Air Minum Layak Sebelum Dan Sesudah Program Perbaikan RTLH	71
Tabel 4.22 Analisis Akses Terhadap Air Minum Layak Bangunan Yang Mendapat Program Perbaikan RTLH.....	71
Tabel 4.23 Perbandingan Akses Terhadap Sanitasi Layak Sebelum Dan Sesudah Program Perbaikan RTLH	72
Tabel 4.24 Analisis Akses Terhadap Sanitasi Bangunan Yang Mendapat Program Perbaikan RTLH.....	72
Tabel 4.25 Perbandingan Kecukupan Pencahayaan Sebelum Dan Sesudah Program Perbaikan RTLH.....	73

Tabel 4.26 Analisis Kecukupan Pencahayaan Bagunan Yang Mendapat Program Perbaikan RTLH.....	73
Tabel 4.27 Perbandingan Sirkulasi Udara Sebelum dan Sesudah Program Perbaikan RTLH	74
Tabel 4.28 Analisis Kecukupan Pencahayaan Bagunan Yang Mendapat Program Perbaikan RTLH.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Diagram Perhitungan Indikator Rumah Layak Huni	35
Gambar 4.1	Dokumentasi Perbaikan Kondisi Ketahanan Bangunan Sebelum dan Sesudah Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ...	67
Gambar 4.2	Rekomendasi Site Tapak Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	77
Gambar 4.3	Rekomendasi Tampak Dari Luar Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	78
Gambar 4.4	Rekomendasi Site Dinding Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	79
Gambar 4.5	Rekomendasi Site Kap Atap Untuk Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap warga negara memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, dengan cara terpenuhi kebutuhan fisik dan rohaninya. Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 28 H Amandemen UUD 1945 bahwa “Rumah adalah salah satu hak dasar setiap rakyat Indonesia, maka setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Rumah memiliki fungsi yang sangat penting bagi individu dan keluarga, tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Disamping itu rumah juga meningkatkan harkat, martabat serta sebagai cerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik harus memenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung. Secara psikis memenuhi rasa kenyamanan dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Menurut *World Health Organization (WHO)*, (2001) “Rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga maupun individu”.

Namun pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Salah satunya penyebabnya adalah

adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (*backlog*) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumah.

Masalah tersebut menjadi perhatian yang sangat serius oleh pemerintah, pemerintah daerah bahkan dunia, dimana penyediaan perumahan dan permukiman yang memenuhi prinsip-prinsip layak, aman, dan terjangkau bagi semua orang telah menjadi komitmen global sebagaimana yang tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab dalam membantu masyarakat agar dapat bertempat tinggal serta melindungi dan meningkatkan kualitas permukiman dan lingkungannya. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya untuk pemenuhan hak masyarakat dan mengaturnya dalam Undang-undang No. 01 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang menjelaskan bahwa “Negara bertanggung jawab melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia”.

Kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah terkait perumahan dan permukiman salah satunya adalah peningkatan pemenuhan kebutuhan Rumah Layak Huni (RLH) yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas, serta kepastian bermukim bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBR). Sama halnya dengan yang dijelaskan oleh Zulkarnain (2016) dalam Erdin S (2021)

bahwa “Dalam pemenuhan kebutuhan rumah, pemerintah telah melakukan program revitalisasi rumah yang tidak layak huni melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)”. Program ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kualitas tempat tinggal masyarakat kurang mampu diseluruh Indonesia. Namun dalam pelaksanaan bantuan rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga ada permasalahan yang dihadapi yaitu seperti tidak tepat sasaran dan tidak merata.

Di Kota Padang, permasalahan perumahan merupakan sebuah isu utama yang selalu mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Kota Padang setiap tahunnya, dikarenakan merupakan permasalahan yang terus berlanjut bahkan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk, dinamika kependudukan dan tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang semakin berkembang. Pada awalnya permasalahan perumahan di Kota Padang dilatar belakangi oleh fenomena *backlog* atau kekurangan terhadap pemenuhan kebutuhan akan rumah, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBR), dan permukiman kumuh yang masih cukup banyak jumlahnya. Menurut Bramantyo (2021) “Fenomena *backlog* ini disebabkan karena harga tanah dan bahan bangunan yang terus meningkat, dan jumlah penduduk yang semakin bertambah, sementara pemerintah tidak memiliki anggaran yang cukup untuk memenuhinya”.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, salah satu program unggulan Kota Padang terkait dengan perumahan dan permukiman adalah menargetkan pelaksanaan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 1000 unit rumah per tahun. Tujuan dari program perbaikan rumah tidak layak huni ini yaitu untuk memenuhi

kebutuhan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Menengah (MBR), yang didukung dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU), sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, teratur serta berkelanjutan.

Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang telah diatur sejak tahun 2015 sampai saat ini, dalam bentuk peraturan walikota, yaitu :

1. Peraturan Walikota Padang No. 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
2. Peraturan Walikota Padang No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
3. Peraturan Walikota Padang No. 28 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
4. Peraturan Walikota Padang No. 62 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota No. 25 A Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Dalam peraturan walikota tersebut telah diatur mengenai mekanisme pengajuan bantuan, dan mekanisme pencairan bantuan. Dalam melaksanakan program perbaikan rumah tidak layak huni, Pemerintah Kota Padang menyerahkan penyelenggaraan program tersebut Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang.

Berdasarkan database Perumahan dan Rumah Tidak Layak Huni Kota Padang, diketahui bahwa pada tahun 2014 rumah tidak layak huni di Kota Padang sekitar \pm 16.508 unit. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada RPJMD tersebut, Kota Padang secara bertahap melakukan perbaikan rumah tidak layak huni agar menjadi rumah layak huni. Dari \pm 16.508 unit rumah tidak layak huni tersebut, sudah sekitar \pm 6.175 unit rumah tidak layak huni yang telah tertangani dari Tahun 2015-2019. Angka ini menunjukkan bahwa capaian kinerja program perbaikan rumah tidak layak huni telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, yang hanya sekitar 5.000 unit sampai akhir tahun periode.

Namun faktanya penyelesaian perbaikan rumah tidak layak huni belum tuntas pada periode RPJMD Kota Padang Tahun 2014-2019, sehingga pada RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024, program perbaikan rumah tidak layak huni masih menjadi program prioritas di Kota Padang. Besaran anggaran yang telah dikururkan dari Tahun 2014-2021 untuk pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang sudah cukup besar yaitu Rp. 46.210.169.044,00 yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kota dan CSR.

Pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang sebagai implementasi kebijakan Pemerintah Kota Padang dalam mengatasi permasalahan perumahan, harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dapat mencapai tujuan dari program tersebut, yang *outcome*-nya dapat menjawab permasalahan perumahan dan permukiman di Kota Padang. Namun sampai saat ini Pemerintah Kota Padang belum pernah melakukan evaluasi atau kajian terhadap implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang

sudah berjalan.

Berdasarkan hal tersebut, maka itu dalam penelitian ini akan mengkaji terkait implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui atau mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program bantuan perbaikan fisik rumah tidak layak huni di Kota Padang, apakah sudah tepat sasaran sesuai tujuan yaitu terbangunnya rumah yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan dengan menggunakan tolak ukur berdasarkan indikator pola perhitungan rumah tidak layak huni (Badan Pusat Statistik) dan indikator perhitungan rumah layak huni (SDGs Indonesia, 2017) yaitu ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, dan kesehatan penghuni.

1.2 Permasalahan Penelitian

Mencermati dari latar belakang diatas, maka masalah dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang.?
2. Bagaimana konsep perbaikan rumah tidak layak huni untuk mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Padang.?

1.3 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Erina Nunung Rohaniati, Rahmat Hidayat, Dewi Noor Azijah	Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Karawang	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui sejauh mana implementasi program RUTILAHU di Kabupaten Karawang dalam rangka mengarungi hunian yang tidak layak dan untuk mengentaskan kemiskinan 	Deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> Dinas PRKP sudah merealisasikan hampir 90% unit/rumah Pentingnya kerjasama dengan <i>stakeholder</i> lainnya untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program Adanya fasilitas yang menunjang demi kelancaran pelaksanaan program ini, seperti kendaraan dinas untuk mensurvey lokasi, meteran pengukur, dan aplikasi <i>Geo Camp</i> untuk mengukur secara detail
2	Nadia Dewita H, Muhammad Ridwan	Pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Bagi Keluarga Miskin Di Kecamatan Bintang Timur Kabupaten Bintang Tahun 2011	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui implementasi Program Rehabilitasi Sosial-Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) bagi keluarga miskin di Kecamatan Bintang Timur, Kabupaten Bintang 	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program RS-RTLH cukup baik, dikarenakan hasilnya telah dapat dirasakan masyarakat secara langsung Terdapat beberapa kendala yaitu kekurangan dana yang diberikan pemerintah, dan terjadinya keterlambatan dalam pelaksanaan program yang disebabkan oleh beberapa hal seperti waktu yang diberikan, keterlambatan datangnya bahan bangunan, serta faktor cuaca yang tidak mendukung
3	Lawuning Nastiti	Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak	<ul style="list-style-type: none"> Mengetahui Implmentasi 	Kualitatif dan	<ul style="list-style-type: none"> Tujuan dari program ini yaitu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Layak Huni Di Kabupaten Magetan Tahun 2014	Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Magetan	Kuantitatif dengan Metode Deskriptif	<p>meningkatkan taraf hidup masyarakat, memberikan tempat tinggal dan kehidupan yang layak, serta hidup bersih dan sehat</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat 4 (empat) aspek yang mempengaruhi implementasi program yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi • Beberapa hambatan dalam proses pelaksanaan program, yaitu bersifat stimulan sehingga penerima bantuan harus tetap mengeluarkan dana untuk membangun, penerima bantuan bukan benar-benar miskin, terdapat keluarga yang tidak ingin dibantu, kesulitan dalam mencari tenaga gotong royong, serta kurang meratanya pembagian anggaran di tiap desa
4	Nida Khoirunnisa	Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Di Desa Pebedilankulon, Kecamatan Pebedilan, Kabupaten Cirebon.	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis keterlibatan masyarakat dalam program rumah tidak layak huni (RTLH) di Desa Pebedilankulon, Kecamatan Pebedilan, Kabupaten Cirebon 	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan masyarakat di Desa Pebedilankulon, Kecamatan Pebedilan, Kabupaten Cirebon belum berjalan optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti kecemburuan sosial, peran pemimpin, ketidakmerataan sosialisasi program, kurangnya kesadaran individu, dan tidak aktifnya organisasi masyarakat

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5	Anisa Ismi	Implementasi Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui implementasi kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni untuk masyarakat miskin di Kecamatan Long Kali • Mengetahui implementasi persyaratan Program Rumah Layak Huni sesuai dengan Peraturan Bupati Paser Nomer 63 Tahun 2019 Tentang Pedoman Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Pengembangan Rumah Layak Huni di Kabupaten Paser khususnya di Kecamatan Long Kali 	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Program bantuan rumah tidak layak huni untuk masyarakat miskin telah terimplementasi di Kecamatan Long Kali, Kabupaten Paser, dilihat dari sosialisasi, evaluasi dan pemenuhan persyaratan bagi penerima bantuan ruma tidak layak huni. • Sosialisasi pogram tidak berjalan dengan optimal • Masih banyak penerima bantuan yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan • Banyaknya evaluasi dari setiap pembangunan, dan pemaparan rancangan pembangunan, sehingga menyebabkan evaluasi tidak berjalan dengan baik • Hambatan program ini yaitu komunikasi atara para pelaksana kebijakan program
6	Achmad Hamdy, Badarudin dan Humaizi	Rumah Tidak Layak Huni Di Kabupaten Asahan Pada Tahun 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui implementasi, hambatan dan tanggapan masyarakat, atas program rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Asahan pada tahun 2019 	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Implementasi program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) Kabupaten Asahan sudah baik, melalui komunikasi, sumber daya manusia (SDM), disposisi dan struktur birokrasi, dilaksanakan sebagai bagian integral dalam mencapai keefektifan program pembangnan sosial untuk kelayakan

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>atap, lantai, dan dinding</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sosial yang dilaksanakan diartikan sebagai ketercapaian kesejahteraan sosial dengan prinsip pembangunan yang tidak <i>sentralistik</i> dan tidak <i>top down</i>. Hambatan sumber daya manusia (SDM) dengan keterbatasan staf dan keterlambatan masyarakat dalam menyelesaikan program dapat diatasi dengan baik • Respon masyarakat penerima manfaat program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) baik, ditandai dengan dukungan capaian program dan penerimaan mereka terhadap persyaratan yang harus dipenuhi baik secara administrasi dan kriteria pemanfaatan bantuan
7	Nursifa	Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Desa Basi, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli.	<ul style="list-style-type: none"> • Mengetahui implementasi program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Desa Basi, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Tolitoli 	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pada indikator organisasi sudah berjalan dengan baik, karena disisi penataan sumber daya sudah memadai dan metode penunjang pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dilakukan sesuai dengan arahan pendamping sebagai pemantauan pelaksanaan. • Pada Indikator Interpretasi di Desa Basi sudah baik, dimana sumber daya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					<p>dalam pelaksanaan program sudah didampingi oleh pihak aparat desa, maupun pendamping yang mengetahui program bantuan stimulan perumahan swadaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pada Indikator Penerapan belum berjalan dengan baik, hal ini disebabkan oleh tidak tepatnya sasaran pada penerimaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, karena masih ada penerima yang layak dan memenuhi kriteria akan tetapi tidak mendapatkan bantuan

Sumber : Diolah Dari Berbagai Sumber, 2023

Berdasarkan beberapa penelitian yang dijabarkan diatas sebelumnya, sehubungan dengan penelitian penulis yaitu dengan tema kajian implementasi program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang, terdapat beberapa perbedaan dengan kajian tersebut.

Penelitian sebelumnya lebih kepada bagaimana proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan perbaikan rumah tidak layak huni, sedangkan pada penelitian ini yang ingin penulis teliti bagaimana pelaksanaan perbaikan fisik bangunan rumah tidak layak huni, disamping itu pada penulisan tesis ini juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan/pengembangan program perbaikan rumah tidak layak huni di Kota Padang kedepannya.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu :

1. Mengetahui/mengevaluasi implementasi program bantuan rumah tidak layak huni dalam rangka mengurangi hunian yang tidak layak di Kota Padang.
2. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan/pengembangan rumah tidak layak huni dalam rangka mengurangi hunian yang tidak layak di Kota Padang.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain adalah :

1. Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan terhadap konsep dan teori mengenai pelaksanaan program perbaikan rumah tidak layak huni yang efektif dan efisien, sehingga bantuan perbaikan rumah tidak layak huni termanfaatkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah Kota Padang dalam penyelenggaraan program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni terkait dengan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan program bantuan tersebut, sehingga program bantuan rumah tidak layak huni yang dilakukan dapat tepat sasaran, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
3. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan menyadarkan masyarakat mengenai pentingnya pemahaman terhadap rumah tidak layak huni serta manfaat akan program perbaikan rumah tidak layak huni.